



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUBEJO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, KERJA SAMA DAN ALUMNI
3. NHK : 859260

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.270.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m²/99 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 2.000 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 3.000 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 130.000.000
4. Tanah Seluas 4.000 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 281.500.000

1. MOBIL, HONDA SPV HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOBIL, MERCY C240AT Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SOLO 125 Tahun 2023, HADIAH Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	900.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	622.000.000
Sub Total	Rp.	3.103.000.000
III. HUTANG	Rp.	450.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.653.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpni.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpni.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.